

MANAJEMEN DOKUMEN ANGGARAN MELALUI APLIKASI SIPD PADA KANTOR BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nurhayati Djafar,¹ Rudin. M², Muhammad Darma Halwi³

Pasca Sarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan menganalisis Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor Penghambat Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan (3) Mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan informan yang dipilih sebanyak tiga orang. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti maka disimpulkan; (1) Manajemen Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah telah meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan. Sistem ini memungkinkan proses pengelolaan anggaran yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi lebih cepat dan terstruktur dengan adanya otomatisasi pengolahan data. (2) Faktor Penghambat Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yaitu (a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, (b) Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata (c) Kesulitan dalam Pembaruan Sistem dan Regulasi (d) Resistensi terhadap Perubahan, (3) Faktor Pendukung Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yaitu ; (a) Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah, (b) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM, (c) Infrastruktur Teknologi yang Memadai, (d) Sistem yang Terintegrasi (e) Transparansi dan Akuntabilitas yang Ditingkatkan. SIPD mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan memungkinkan akses yang lebih mudah dan lebih terbuka terhadap data anggaran.

Kata kunci : Manajemen, Dokumen Anggaran dan Aplikasi SIPD.

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) To know and analyze Budget Document Management Through SIPD Application at Bappeda Office of Central Sulawesi Province. (2) To know and analyze Inhibiting Factors of Budget Document Management Through SIPD Application at Bappeda Office of Central Sulawesi Province and (3) To know and analyze Supporting Factors of Budget Document Management Through SIPD Application at Bappeda Office of Central Sulawesi Province. This type of research is qualitative research with three selected informants. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Based on the results of research and analysis conducted by the researcher, it is concluded; (1) Management of the Implementation of Regional Development Information System (SIPD) at Bappeda Office of Central Sulawesi Province has increased efficiency, transparency and accountability in every stage of budget management, from planning, allocation, to reporting. This system allows the budget management process which previously took a long time to be faster and structured with the automation of data processing. (2) Inhibiting Factors in Budget Document Management Through the SIPD Application at the Bappeda Office of Central Sulawesi Province, namely: (a) Limited Human Resources, (b) Uneven Technological Infrastructure, (c) Difficulties in Updating Systems and Regulations, (d) Resistance to Change, (3) Supporting Factors in Budget Document Management Through the SIPD Application at the Bappeda Office of Central Sulawesi Province, namely: (a) Commitment and Support from the Regional Government, (b) Training and Capacity Building of Human Resources, (c) Adequate Technological Infrastructure, (d) Integrated Systems, (e) Enhanced Transparency and Accountability. SIPD encourages transparency in budget management by enabling easier and more open access to budget data.

Keywords: Management, Budget Documents, and SIPD Application.

A. PENDAHULUAN

Manajemen dokumen anggaran merupakan salah satu aspek terpenting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Anggaran negara atau daerah, yang merupakan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan, harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan. Namun, di banyak daerah di Indonesia, pengelolaan anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan alokasi anggaran, lambatnya proses revisi

anggaran, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik.¹

Pada era digital ini, berbagai inovasi teknologi hadir untuk memperbaiki sistem manajemen keuangan dan anggaran, salah satunya adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini memungkinkan proses pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien, dengan memberikan kemudahan dalam mengakses data anggaran secara real-time dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran. Dengan adanya SIPD, diharapkan bisa tercapai tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.²

Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab besar dalam merencanakan dan mengelola anggaran pembangunan daerah, dituntut untuk dapat mengelola dokumen anggaran dengan baik. Sebelum penerapan SIPD, pengelolaan anggaran di Bappeda Sulawesi Tengah masih dilakukan dengan cara manual dan aplikasi yang kurang terintegrasi, yang menyebabkan beberapa kendala dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pelaporan anggaran. Pengelolaan yang kurang efisien ini seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta menghambat proses revisi yang diperlukan agar anggaran dapat tepat sasaran. Oleh karena itu, implementasi SIPD diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Bappeda.

¹ Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).

² Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.

Penerapan SIPD mengalami hambatan. Di lapangan, terdapat beberapa kendala yang muncul dalam proses implementasinya, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama akses internet yang terbatas di daerah-daerah terpencil, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem ini dengan optimal.³ Meskipun SIPD sudah dirancang untuk mempermudah pengelolaan anggaran, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pelatihan dan pembinaan agar pengguna sistem bisa mengoptimalkan fitur yang ada dalam SIPD.

Berdasarkan penelitian awal di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa fenomena atau permasalahan dalam pemakaian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu ; (a) Kendala Teknis seperti Jaringan yang tidak stabil, server down, dan bug dalam aplikasi dapat menghambat proses penyusunan dan pengelolaan dokumen anggaran. (b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia seperti ; Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan SIPD oleh pegawai daerah dapat menjadi penghambat. (c) Koordinasi Antar-OPD misalnya : Kurangnya koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penggunaan SIPD dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan informasi. (e) Keterbatasan Akses yaitu Beberapa OPD masih mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi SIPD, terutama pada saat penyusunan dokumen anggaran dan (e) Integrasi dengan Sistem Lain: Integrasi SIPD dengan sistem

³ Rudin, M., Bakarbesy, M. L. F., & Fadlun, F. (2024). Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 186-199.

keuangan daerah yang sudah ada (seperti SIMDA Keuangan) masih belum optimal. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang maka menarik dilakukan penelitian karya ilmiah berupa Tesis dengan judul Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah?
- 2) Apa faktor penghambat Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam

penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Definisi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antara kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi apa adanya melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun alasan mengambil lokasi penelitian ini karena di lokasi penelitian ini terdapat fenomena mengenai penyusunan dokumen anggaran melalui aplikasi

D. PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perjalanan sejarah yang panjang, yang dimulai sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964. Sebagai provinsi yang baru terbentuk akibat pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan dan pengelolaan pemerintahan

⁴ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

daerah. Untuk itu, dibutuhkan lembaga perencanaan yang berperan penting dalam merancang dan mengarahkan pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah hadir untuk menjalankan fungsi tersebut dengan penuh dedikasi dan komitmen untuk mendukung kemajuan daerah.

Provinsi Sulawesi Tengah resmi dibentuk pada 13 April 1964 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Dengan terbentuknya provinsi ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyusun perencanaan pembangunan yang bisa mendukung kemajuan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Pada saat yang bersamaan, pemerintah pusat di Jakarta mulai merancang sistem kelembagaan yang dapat mengatur pembangunan di seluruh daerah Indonesia. Hal ini termasuk pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.⁶

Seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang pembentukan Bappeda, setiap provinsi mulai membentuk lembaga yang memiliki tugas perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Bappeda berperan sebagai lembaga yang bertugas merencanakan dan mengarahkan pembangunan di tingkat provinsi, serta bertindak sebagai penghubung antara pemerintah

⁶ Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.

pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

1. Analisa Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Manajemen dokumen anggaran menjadi salah satu elemen penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen anggaran, salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), telah membuka peluang besar bagi pemerintah daerah, termasuk Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, untuk menyusun dan mengelola dokumen anggaran secara lebih sistematis dan terintegrasi.⁷ SIPD merupakan alat yang memungkinkan pengelolaan dan pemantauan anggaran pembangunan secara real-time, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.

SIPD merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mempermudah pengelolaan perencanaan dan anggaran daerah. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan sistem yang terintegrasi antara dokumen perencanaan pembangunan, dokumen anggaran, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di setiap pemerintahan daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, penerapan SIPD oleh Bappeda telah membantu dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran yang lebih terstruktur, transparan, dan efisien.

Implementasi SIPD pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan

⁷ Restu, Karto. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

kualitas pengelolaan anggaran daerah. Sebelum adanya aplikasi SIPD, pengelolaan anggaran masih dilakukan secara manual atau dengan sistem terpisah antara perencanaan dan pengelolaan anggaran. Hal ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran yang mengarah pada rendahnya tingkat akuntabilitas.⁸

a. Pentingnya Manajemen Dokumen Anggaran di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran krusial dalam menyusun dokumen anggaran yang akan digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Dokumen anggaran yang disusun di Bappeda melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga sektor ekonomi dan pariwisata. Sebagai lembaga yang bergerak dalam perencanaan pembangunan, Bappeda harus memastikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang tercantum dalam ****Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**** dan ****Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)****. Pengelolaan dokumen anggaran yang tidak efisien atau kurang transparan dapat berisiko pada ketidakefektifan penggunaan anggaran, bahkan potensi penyalahgunaan dana.

⁸ Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71

Dengan adanya aplikasi SIPD, Bappeda dapat menyusun anggaran secara lebih terstruktur dan transparan. SIPD memungkinkan pengelolaan anggaran yang berbasis pada perencanaan terpadu yang menghubungkan antara RPJMD, RKPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Melalui SIPD, setiap alokasi anggaran dapat dilacak dan dipantau dengan lebih akurat, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

b. Proses Manajemen Dokumen Anggaran dengan SIPD

1. Penyusunan Dokumen Anggaran

Pada tahap awal, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan SIPD untuk menyusun dokumen anggaran yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan ini dimulai dari pemetaan prioritas pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMD dan RKPD, diikuti dengan pengalokasian dana untuk setiap program dan kegiatan yang telah disusun.⁹ SIPD menyediakan fitur untuk menyusun anggaran sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang kemudian diintegrasikan ke dalam anggaran tahunan daerah.

2. Pengelolaan dan Pengawasan Anggaran

Setelah dokumen anggaran disusun, SIPD memudahkan Bappeda untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan anggaran. Aplikasi ini memungkinkan pengawasan penggunaan dana yang lebih efisien dan akurat, dengan kemampuan untuk

⁹ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM
YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

memonitor real-time terhadap alokasi dana yang telah disetujui. Pengelolaan anggaran melalui SIPD juga memungkinkan Bappeda untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya.

3. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu fitur unggulan dari SIPD adalah kemampuannya dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus. Bappeda dapat melihat progres pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, termasuk apakah program atau kegiatan pembangunan telah berjalan sesuai dengan perencanaan atau mengalami kendala. Fitur ini juga memungkinkan pihak yang berwenang untuk melakukan penyesuaian anggaran jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan.¹⁰

4. Laporan dan Transparansi

SIPD memudahkan penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Laporan ini mencakup penggunaan anggaran pada setiap program dan kegiatan yang telah disusun. Selain itu, SIPD juga mendukung transparansi penggunaan anggaran dengan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan akuntabel.¹¹

¹⁰ Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkececwara).

¹¹ Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).

c. Keuntungan Penggunaan SIPD di Bappeda Sulawesi Tengah

1. Efisiensi dan Akurasi

Penggunaan SIPD mempermudah Bappeda dalam menyusun dan mengelola anggaran daerah. Sistem ini mempercepat proses penyusunan dokumen anggaran, mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi, serta memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan adanya aplikasi ini, dokumen anggaran dapat disusun dengan lebih cepat dan dalam format yang sudah standar.¹²

2. Peningkatan Transparansi

SIPD memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran daerah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Transparansi ini juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik.¹³

3. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Baik

Aplikasi SIPD memungkinkan Bappeda untuk memonitor penggunaan anggaran secara real-time. Dengan adanya kemampuan untuk melakukan evaluasi terus-menerus, Bappeda dapat mengidentifikasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan anggaran, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini mendukung pencapaian hasil pembangunan yang lebih optimal.

¹² Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

¹³ Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Azkiya Publishing Prum Bukit Gorp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwisung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka.aq@gmail.com HP 0895603733059 ISBN : 978-623-7021-29-2 14x21 cm = 252, Cetakan Pertama. Diakses 5 September 2024.

4. Meningkatkan Akuntabilitas

Salah satu tujuan utama dari penggunaan SIPD adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Setiap langkah dalam proses pengelolaan anggaran tercatat dengan jelas, memudahkan dalam melakukan audit, serta memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar dialokasikan untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

d. Tantangan dalam Implementasi SIPD di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Meskipun SIPD memberikan banyak manfaat, implementasinya di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengoperasian aplikasi SIPD memerlukan keterampilan dan pemahaman yang baik dari para pengelola anggaran. Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah harus menghadapi tantangan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM agar dapat memanfaatkan fitur-fitur dalam SIPD secara optimal.¹⁴

2. Infrastruktur Teknologi yang Belum Merata

Salah satu tantangan besar adalah infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Kendala dalam koneksi internet dan perangkat keras yang kurang memadai dapat menghambat pemanfaatan SIPD secara maksimal.¹⁵

¹⁴ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

¹⁵ Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

3. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Perubahan regulasi terkait pengelolaan anggaran daerah terkadang memerlukan pembaruan dalam sistem SIPD. Bappeda harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan aplikasi SIPD dapat dengan cepat disesuaikan dengan perubahan kebijakan dan regulasi terbaru.

Implementasi aplikasi SIPD pada Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap manajemen dokumen anggaran daerah. Melalui SIPD, Bappeda dapat menyusun dan mengelola anggaran dengan lebih efisien, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, penggunaan SIPD memberikan potensi besar dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik, terencana, dan akuntabel.¹⁶ Ke depan, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah perlu terus melakukan perbaikan, peningkatan kapasitas SDM, serta memastikan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung optimalisasi penggunaan aplikasi SIPD.¹⁷

¹⁶ Wejak, K. C. D. V., & Huseno, T. (2025). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata* (Doctoral Dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam. Negeri).

¹⁷ Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.

2. Analisa Faktor Penghambat Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

Manajemen dokumen anggaran yang efisien dan transparan sangat penting bagi keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Meskipun aplikasi SIPD memberikan banyak manfaat dalam pengelolaan dokumen anggaran, implementasinya tidak selalu berjalan mulus.¹⁸ Terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas penggunaan SIPD dalam manajemen dokumen anggaran di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah. Faktor-faktor ini mencakup masalah sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, peraturan, dan faktor organisasi.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi SIPD adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan aplikasi ini. Meskipun SIPD dirancang untuk mempermudah pengelolaan anggaran, penggunaannya tetap memerlukan pemahaman yang mendalam tentang sistem dan kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.

a. Kurangnya Pelatihan dan Keterampilan Teknis

Banyak pegawai di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yang belum sepenuhnya terlatih untuk menggunakan aplikasi SIPD dengan optimal. Proses pelatihan yang tidak memadai atau tidak

¹⁸ Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.

merata di seluruh level staf menyebabkan beberapa pihak tidak mampu memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam SIPD secara maksimal.¹⁹ Akibatnya, pengelolaan dokumen anggaran menjadi tidak efisien, dan kesalahan dalam penginputan data atau penggunaan aplikasi pun lebih sering terjadi.

b. Resistensi terhadap Perubahan

Selain itu, faktor psikologis dan budaya organisasi juga berperan dalam penghambatan implementasi SIPD. Beberapa pegawai mungkin merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan sistem yang baru. Hal ini dapat menurunkan motivasi untuk menggunakan aplikasi secara maksimal. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi memerlukan perubahan pola kerja yang sudah terbiasa, dan jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan resistensi terhadap perubahan.

2. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Implementasi SIPD memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, terutama terkait dengan jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang sesuai. Di beberapa daerah di Sulawesi Tengah, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki infrastruktur terbatas, masalah ini menjadi kendala yang cukup besar.

a. Koneksi Internet yang Tidak Stabil

SIPD merupakan aplikasi berbasis cloud yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses dan memproses data.²⁰ Di beberapa lokasi di Sulawesi Tengah, koneksi internet yang lambat atau bahkan tidak stabil dapat menghambat aksesibilitas aplikasi

¹⁹ Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10* Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

²⁰ Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta

SIPD. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pembaruan data, keterlambatan dalam pengelolaan anggaran, serta kesulitan dalam melakukan koordinasi antar instansi yang terhubung ke aplikasi.

b. Keterbatasan Perangkat Keras

Selain masalah koneksi internet, keterbatasan perangkat keras juga menjadi faktor penghambat. Banyak perangkat komputer atau laptop yang digunakan oleh pegawai Bappeda di Sulawesi Tengah tidak memadai untuk menjalankan aplikasi SIPD dengan baik. Aplikasi yang membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih tinggi atau aplikasi yang lebih berat memerlukan perangkat keras yang mampu mendukungnya.²¹ Oleh karena itu, beberapa pegawai mengalami kesulitan dalam mengakses atau memproses data anggaran secara cepat dan efisien.

3. Perubahan Regulasi dan Kebijakan

Sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah terus mengalami perubahan seiring dengan kebijakan pemerintah pusat dan regulasi yang diterbitkan. Perubahan ini memerlukan pembaruan sistem yang terus-menerus agar aplikasi SIPD tetap dapat mengakomodasi aturan yang berlaku.

a. Keterlambatan Pembaruan Sistem

Perubahan regulasi atau kebijakan yang tidak disertai dengan pembaruan sistem dalam aplikasi SIPD dapat menghambat pengelolaan dokumen anggaran. Misalnya, apabila ada perubahan dalam format laporan anggaran atau aturan baru mengenai alokasi dana tertentu, aplikasi SIPD yang tidak diperbarui akan

²¹ Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP. STIM
YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

menyebabkan ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan. Hal ini dapat berakibat pada kesalahan dalam pencatatan atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

b. Proses Sosialisasi yang Kurang Efektif

Selain itu, adanya perubahan regulasi atau kebijakan yang belum disosialisasikan dengan baik kepada pegawai yang terlibat juga dapat menyebabkan implementasi SIPD menjadi terhambat. Jika perubahan tersebut tidak dipahami dengan baik oleh pengguna, maka penggunaan SIPD akan menjadi kurang optimal, bahkan bisa berujung pada kesalahan dalam pengelolaan anggaran.²²

4. Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan Sistem

Untuk mengoptimalkan penggunaan SIPD, perlu ada dukungan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem. Namun, seringkali anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sistem ini terbatas, sehingga proses pembaruan dan pemeliharaan aplikasi menjadi terhambat.

a. Kurangnya Anggaran untuk Pemeliharaan dan Upgrade Sistem

Aplikasi SIPD memerlukan pembaruan rutin untuk meningkatkan fungsionalitas, memperbaiki bug, dan menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Namun, karena keterbatasan anggaran, proses pemeliharaan dan pengembangan sistem SIPD tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan aplikasi tidak dapat berfungsi dengan baik,

²² Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).

mengurangi efisiensi dan efektivitas pengelolaan dokumen anggaran di Bappeda.

b. Pendanaan untuk Pelatihan dan Peningkatan SDM

Pelatihan SDM yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai Bappeda dapat menggunakan aplikasi SIPD dengan baik. Namun, karena keterbatasan anggaran, pelatihan yang diberikan mungkin tidak mencakup seluruh staf atau tidak cukup intensif, sehingga menyebabkan ketidaksempurnaan dalam penggunaan aplikasi dan berpotensi menghambat pengelolaan anggaran yang efisien.

5. Tantangan dalam Koordinasi Antar Instansi**

Aplikasi SIPD berfungsi untuk mengintegrasikan pengelolaan anggaran antara berbagai sektor dan instansi yang terlibat dalam pembangunan daerah. Namun, koordinasi antar instansi yang terlibat sering kali menjadi hambatan dalam implementasi SIPD.

a. Kurangnya Kolaborasi Antar Instansi

Sering kali, terdapat hambatan dalam hal koordinasi dan kolaborasi antara Bappeda dengan instansi lain yang juga terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Jika tidak ada kesepahaman yang jelas antara instansi terkait mengenai penggunaan SIPD, maka sistem ini tidak akan berjalan secara optimal.²³ Data yang dimasukkan oleh masing-masing instansi bisa saja tidak sinkron atau terdapat perbedaan dalam

²³ Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Azkiya Publishing Prum Bukit Gorp Arcadia Housing F6 No 10 Leuinanggung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka.aq@gmail.com HP 0895603733059 ISBN : 978-623-7021-29-2 14x21 cm = 252, Cetakan Pertama. Diakses 5 September 2024.

pemahaman penggunaan aplikasi, yang akhirnya mempengaruhi kualitas dan akurasi dokumen anggaran.

b. Keterlambatan dalam Penginputan Data

Proses penginputan data anggaran yang terhambat karena kurangnya koordinasi antar instansi menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan dokumen anggaran. Hal ini memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta mengganggu akurasi data yang ada di dalam aplikasi SIPD.

Meskipun aplikasi SIPD menawarkan berbagai manfaat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen anggaran di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, perubahan regulasi yang terus-menerus, keterbatasan anggaran, dan tantangan koordinasi antar instansi menjadi penghambat yang signifikan. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang intensif, peningkatan infrastruktur teknologi, pembaruan aplikasi SIPD secara berkala, serta pengalokasian anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem dan peningkatan koordinasi antar instansi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi SIPD di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih optimal, sehingga pengelolaan dokumen anggaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan akuntabel.

E. KESIMPULAN

1. Manajemen Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah telah membawa dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan dokumen anggaran daerah. Secara operasional, SIPD telah meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga pelaporan. Sistem ini memungkinkan proses pengelolaan anggaran yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi lebih cepat dan terstruktur dengan adanya otomatisasi pengolahan data. Dengan SIPD, pengelolaan dokumen anggaran menjadi lebih terintegrasi, di mana semua data anggaran dapat diakses secara real-time oleh pihak yang berwenang. Hal ini mempercepat proses evaluasi dan pengawasan anggaran, serta meningkatkan akurasi data yang disajikan. Selain itu, sistem ini mempermudah koordinasi antar instansi yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, mengurangi risiko duplikasi anggaran, dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Secara keseluruhan, implementasi SIPD di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah memperbaiki pengelolaan dokumen anggaran.
2. Faktor Penghambat Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah yaitu (a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, (b) Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata (c) Kesulitan dalam Pembaruan Sistem dan Regulasi (d) Resistensi

terhadap Perubahan. Secara keseluruhan, meskipun SIPD memberikan keuntungan dalam pengelolaan dokumen anggaran, faktor-faktor penghambat ini harus segera ditangani. Penyelesaian tantangan terkait SDM, infrastruktur, dan pembaruan sistem akan sangat membantu dalam memastikan implementasi SIPD dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal dalam pengelolaan anggaran daerah.

F. SARAN

Saran Operasional kepada Kantor Bappeda Sulawesi Tengah tentang Manajemen Dokumen Anggaran Melalui Aplikasi SIPD sebagai berikut ;

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kantor Bappeda perlu menyelenggarakan pelatihan berkala bagi seluruh pegawai terkait pengoperasian aplikasi SIPD. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis penggunaan sistem, serta pemahaman tentang regulasi terbaru dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa pegawai dapat menggunakan sistem secara efektif dan efisien.

2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Mengingat beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, Bappeda perlu meningkatkan kualitas koneksi internet dan perangkat keras yang digunakan. Ini penting untuk memastikan kelancaran operasional SIPD, terutama dalam memproses data secara real-time dan menghindari gangguan operasional.

3. Pembaruan dan Pemeliharaan Sistem SIPD

Sistem SIPD perlu diperbarui secara berkala untuk mengikuti perubahan regulasi yang sering terjadi dalam pengelolaan anggaran daerah. Bappeda harus memastikan adanya kerja sama yang erat dengan pengembang sistem untuk memperbarui fitur dan fungsi SIPD agar sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Akhmad, 2019, *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Penerbit Azkiya Publishing Prum Bukit Golp Arcadia Housing F6 No 10 Leuwinagunggung Gunung Putri Bogor Bekerjasama dengan Colli Puji'e FKIP Sastra UNIBOS Didistribusikan Oleh: Pustaka AQ Nyutran MG II 14020 Yogyakarta pustaka.aq@gmail.com HP 0895603733059 ISBN : 978-623-7021-29-2 14x21 cm = 252, Cetakan Pertama. Diakses 5 September 2024.
- Iribaram, S. H. N., & Asri, J. D. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika (Doctoral Dissertation, IPDN).
- Kurniati (artikel 2025). Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Sebagai Penunjang Pengelola Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang) (Doctoral Dissertation, Stie Malangkucecwara).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP.STIM YKPN Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nur, H. M., Pratiwi, E. T., Ramli, M. R., & Simantik, D. (2025). Analisis Penyusunan. Perencanaan Anggaran Pemerintah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau). *ESCAF*, 63-71.

- Riduwan. 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Restu, Karto. 2010. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rudin, M., Bakarbesy, M. L. F., & Fadlun, F. (2024). Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 186-199.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 6. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15-22.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wejak, K. C. D. V., & Huseno, T. (2025). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Lembata* (Doctoral Dissertation, Intitut Pemerintahan Dalam. Negeri).
- Yulianti, P. (2025). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Di Kabupaten Batanghari* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).